



## Insentif Guru Honor

## Bakal Naik

**PONTIANAK** - Alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota Pontianak untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) naik. Tahun 2019 lalu anggaran yang digelontorkan sebesar Rp11 miliar. Tahun ini alokasi anggaran itu naik

menjadi Rp20 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Syahdan menyatakan dengan kenaikan alokasi anggaran itu maka honor yang akan diterima para guru honorer di Kota Pontianak juga akan naik.

Tercatat ada 800 guru

honorer di SD dan 400 guru honorer di SMP se-Kota Pontianak. Meski demikian ia tak menyebutkan secara detail berapa kenaikan honor yang akan diterima para tenaga honorer ini. "Tahun ini jika tidak salah naik lebih dari sebelumnya dan porsinya

bervariasi," kata Syahdan di Pontianak, kemarin.

Syahdan menjelaskan pihaknya akan melakukan klasifikasi karena alokasi anggaran dari BOSDA yang digunakan untuk memberikan upah bagi tenaga honor hanya bagi mereka

yang tidak masuk dalam anggaran BOSNAS. "Nanti klasifikasi, jika mereka sudah dapat BOSNAS, maka tidak lagi mendapat BOSDA. Jika belum maka mendapat dari BOSDA," terang Syahdan.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



## Insentif Guru Honor Bakal Naik

Sambungan dari halaman 9

Menurut Syahdan pengklasifikasian itu dilakukan karena Kementerian Pendidikan juga menambahkan persentasi pemanfaatan pada dana BOS untuk memberikan upah bagi tenaga honorer. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler memberikan ruang pemanfaatan dana untuk memberikan gaji guru honorer. Alokasinya hanya 15 persen dari dana BOS yang dikucurkan ke sekolah.

Sementara di Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pemanfaatan itu bertambah. Sekolah dapat menggunakan maksimal 50 persen dana BOS untuk pembayaran honor. Namun Syahdan mengingatkan honor yang bersumber dari BOSNAs hanya diberikan bagi guru yang memiliki Nomor

Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara yang tidak alokasi anggaran untuk honor bersumber dari BOSDA. "Kebijakan ini hanya bagi guru honor yang memiliki NUPTK, tetapi tidak semua punya maka tetap dianggarkan melalui BOSDA," jelas Syahdan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak Mujiono mendukung langkah Pemerintah Kota Pontianak menaikkan insentif bagi guru honorer seiring dengan naiknya alokasi anggaran untuk BOSDA. "DPRD setuju dengan kenaikan honorer ini karena sudah lama di-suarakan," kata Mujiono.

Mujiono juga meminta dengan kenaikan insentif itu maka kinerja dari para tenaga honor di sekolah juga mestinya naik. Adanya kenaikan kinerja, maka kualitas pendidikan dari Kota Pontianak juga akan meningkat. "Sehingga harapannya dengan kenaikan honor ini kompetensi mereka meningkat juga, jangan pula menjadi turun atau sama," pinta Mujiono.

Mujiono juga mengapresiasi kebijakan kementerian pendidikan yang

menaikkan pengelolaan dana BOS untuk memberikan upah honorer di sekolah dari 15 persen menjadi 50 persen. "Jika dulu dibatasi sehingga honor yang diberikan itu menjadi minim dan tidak sesuai standar, bahkan untuk standar UMK saja tidak tercapai," ujar Politisi PAN.

Menurut Mujiono, dengan adanya perubahan kebijakan dari kementerian pendidikan terkait dana BOS menjadi peluang untuk sekolah untuk lebih memaksimalkan kinerja honor di sekolah tentunya berkaitan dengan upah. Namun demikian ia berharap di tingkat bawah tidak ada lagi hambatan untuk memberikan upah sesuai UMK karena kebijakan itu menjadi peluang bagi sekolah menjadi lebih fleksibel dalam memberikan honor bagi tenaga honorer.

"Jika honorer sudah naik maka yang perlu diberlakukan pemerintah adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru honorer agar kompetensinya meningkat," saran Mujiono.

Akademisi Universitas

Tanjungpura Aswandi menyetujui kebijakan kenaikan insentif bagi guru honorer yang berasal dari dana BOSDA. Pasalnya selama ini diakui para guru honorer menerima gaji yang bahkan tidak memenuhi standar UMR. Selain itu pun ia juga mengapresiasi dengan kebijakan pemerintah pusat memperbesar porsi penggunaan dana BOS untuk gaji tenaga honorer menjadi 50 persen. Meski demikian ia menilai porsi itu tak terlalu besar karena melihat jumlah guru honorer di sekolah. Semakin banyak guru honorer di sekolah maka jumlah yang didapatkan akan tetap kecil.

Namun ia tetap mengapresiasi karena kebijakan itu dinilai tepat sebagai salah satu solusi menuntaskan persoalan kesejahteraan guru. Sebab, jika kesejahteraan guru itu didapatkan dari dana tambahan yang bersumber dari masyarakat kerap mendapat penolakan, terkecuali sumbangan untuk pembangunan fasilitas sekolah.

Menurutnya peran guru sangat penting dalam meningkatkan mutu pendid-